



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja yang telah ditetapkan.

Provinsi Lampung pada Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 yang menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dalam bentuk agenda (Tujuan) dan prioritas (Sasaran) pembangunan serta mengaktualisasikan Program dan Kegiatan pembangunan khususnya di Provinsi Lampung.

Oleh karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015 perlu dievaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah **sangat tinggi**, karena 73 dari 83 indikator memenuhi kriteria **sangat tinggi** dan 5 indikator memenuhi kriteria **tinggi**, 3 indikator dengan kriteria **sedang** dan 2 indikator dengan kriteria **rendah**. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2015 – 2019 dan RKPD 2015, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal dengan Sistem Informasi Perencanaan (<http://bappeda.lampungprov.go.id>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id berfungsi mengintegrasikan perencanaan jangka



menengah (RPJMD, Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan penganggaran (KUA/PPAS).

Begitu juga pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Sistem ini sangat mendukung Provinsi Lampung sebagai fungsi pengendalian, dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Inovasi di bidang keuangan telah dikembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada azas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem aplikasi ini meliputi penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah provinsi Lampung.

Selain itu telah dikembangkan juga sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui Sistem Aplikasi Pelaporan (www.monev-apbd.Lampungprov.go.id) yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan Program/Kegiatan pembangunan terhadap Penyerapan APBD Provinsi Lampung baik berupa Realisasi keuangan dan capaian kinerja yang bersumber dari dana APBD pada setiap SKPD. Selain itu Sistem aplikasi Pelaporan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan fisik dan keuangan pada setiap SKPD Provinsi Lampung secara sistematis, terukur, *up to date* dan transparan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung ke depan.

Inovasi di bidang kesehatan berupa rumah sakit keliling yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan kesehatan terutama siaga bencana. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit keliling tersebut berupa pelayanan : operasi, pemeriksaan laboratorium, Radiologi, dan *Recovery* : pemulihan pasien).

Selain itu pengelolaan data pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) berbasis *web* sehingga terwujudnya penyediaan data pegawai yang cepat dan akurat dengan membangun *Executive Information System* (EIS) SIMPEDU yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyajian



dan pelaporan data kepegawaian khususnya bagi eksekutif (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi Kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan pejabat lain yang berwenang menangani data kepegawaian).

Selain itu, Provinsi Lampung telah mengoperasikan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) berbasis Web SIGA. Sistem ini adalah sebuah aplikasi yang dapat menampung data terpilah gender secara terpusat dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengelolanya. SIGA menampung dan mengolah informasi dari SKPD-SKPD terkait dan dari Badan PP dan KB Kabupaten/ Kota. Data ini diunggah ke situs SIGA yaitu www.sigabp3a.lampungprov.go.id sehingga dapat diakses pihak terkait untuk monitoring, evaluasi dan sebagai bahan dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Pertama, walaupun sebagian besar IKU telah mencapai target yang sangat baik namun, persoalan-persoalan dimasyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan sanggar kesenian, kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan, penurunan kemiskinan (ketimpangan) serta perusahaan yang menjadi peserta PROPER. Peran Pemerintah diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan.

Kedua, hal ini bisa juga diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kab/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi Lampung, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Lampung maupun juga dengan pihak – pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran yaitu Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah, serta meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di Pemerintah Provinsi Lampung sendiri,

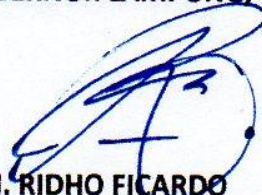


ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya nyata untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikian LKj Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun dengan menggambarkan capaian kinerja tiap sasaran pembangunan daerah pada tahun 2015 dan membandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan proyeksi target sasaran dan indikator kinerja tahun 2016 serta capaian RPJMD tahun 2019 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO